

## **PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN (Studi tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah)**

**Mohammad Thoha**

**Abstrak:** Pendidikan bertujuan mengembangkan SDM melalui kegiatan pengajaran. Manusia seutuhnya merupakan istilah yang dikenal dalam konteks keindonesiaan berupa terciptanya sebuah generasi yang terdidik, penuh toleran, dinamis dan diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mensukseskan hal itu, maka kebijakan pendidikan harus berpihak pada masyarakat, sehingga konsep yang akan diterapkan adalah pendidikan yang humanis sebagai sarana dinamisasi perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya otonomi pendidikan yang di dalamnya terkandung MBS sebagai dasar desentralisasi pendidikan, maka proses pendidikan menjadi tanggung jawab bersama di antara unsur-unsur pendidikan. Melalui manajemen model ini, lembaga pendidikan memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penyederhanaan birokrasi, sistem evaluasi, pemetaan kurikulum dan sebagainya.

**Kata kunci:** Kebijakan pendidikan; otonomi pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah.

### **Pendahuluan**

Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran.<sup>1</sup> Aspek yang sangat urgen dalam pendidikan adalah belajar (*learning*) dan pembelajaran (*instruction*). Belajar (*learning*) merupakan tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.<sup>2</sup> Sedangkan pembelajaran (*instruction*) adalah proses interaksi antara guru sebagai pengajar, sedangkan siswa sebagai

---

<sup>1</sup>Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 1.

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 68.

### *Perkembangan Kebijakan Pendidikan*

pelajar.<sup>3</sup> Dengan demikian, pendidikan merupakan sebuah proses pendewasaan manusia (peserta didik) untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Proses interaksi tersebut dilakukan melalui serangkaian latihan dan pengalaman yang dijalani oleh peserta didik. Dalam makna lain, pendidikan bukan hanya sekedar pelaksanaan kebijakan nasional atau sekedar persesuaian nilai-nilai yang ada di masyarakat, akan tetapi lebih dari itu, pendidikan harus dilihat sebagai salah satu kekuatan sosial yang ikut memberi bentuk, corak, dan arah pada kehidupan masyarakat masa depan.<sup>4</sup>

Pengertian pendidikan tersebut dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan adalah memberikan bekal keterampilan dan pengalaman kepada anak didik untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya secara baik. Dalam perspektif Islam, sebagaimana dikemukakan beberapa ahli, pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berkepribadian Islam<sup>5</sup> yakni berakhlak mulia<sup>6</sup> untuk mencapai predikat *insân kâmil*<sup>7</sup> atau manusia seutuhnya sebagai representasi dari hakikat dirinya sebagai hamba Allah (*'abd Allâh*),<sup>8</sup> dan sebagai pemimpin di muka bumi (*khalifah Allâh*)<sup>9</sup> yang selalu tunduk dan pasrah kepada kehendak dan hukum Allah SWT.<sup>10</sup>

---

<sup>3</sup>Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 3.

<sup>4</sup>H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), hlm. 149.

<sup>5</sup>Ahmad Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Maarif, 1964), hlm. 39.

<sup>6</sup>Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A. Gani dan Djohar Bahri (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 15.

<sup>7</sup>Muhammad Munir Mursy, *al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah: Usûluhâ wa Tathawwuruhâ fi Bilad al-'Arabiyyah* (Kairo: 'Alam al-Kutub, 1977), hlm.18. Manusia seutuhnya menurut Priyatno adalah manusia yang mampu menciptakan dan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya berkat pengembangan segenap potensi dirinya secara optimal (aspek individu), dengan mengedepankan asas kebersamaan dengan lingkungannya (aspek sosial), serta dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik pertanggungjawaban di dunia maupun pertanggungjawaban di akhirat (aspek agama). Baca Priyatno dan Erman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.20.

<sup>8</sup>Abdul Fatah Jalal, *Azaz-azaz Pendidikan Islam*, terj. Herry Noer Ali (Bandung: Diponegoro, 1988), hlm. 119-124.

Terciptanya manusia seutuhnya menjadi tujuan agung dari semua proses pendidikan. Dalam konteks Indonesia, kata "manusia seutuhnya" menjadi simbol dari sebuah generasi yang dianggap memenuhi harapan bangsa Indonesia untuk melestarikan pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi budaya-budaya luhur sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Ciri manusia seutuhnya menurut Ahmad Tafsir adalah manusia yang memiliki jasmani yang sehat, kuat dan terampil, memiliki akal yang cerdas dan pandai yang mampu menyelesaikan masalah secara tepat, cepat, ilmiah dan filosofis, memiliki dan mengembangkan sains dan filsafat, serta memiliki hati yang bertakwa kepada Allah SWT yang ditunjukkan dengan sikap sukarela untuk menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan-Nya.<sup>11</sup>

Dari beberapa tujuan pendidikan seperti dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa manusia sebagai pelaksana pendidikan, memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan di muka bumi. Tanggung jawab tersebut tidak begitu saja selesai dengan berakhirnya kehidupan dunia ini, akan tetapi hal itu juga mengikat pada kehidupan akhirat. Rasa tanggung jawab tersebut harus dimiliki oleh seluruh umat manusia. Penanaman rasa tanggung jawab terhadap seorang anak harus dimulai sejak usia dini.<sup>12</sup>

Berangkat dari pemahaman bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam mengantarkan generasi bangsa ini menuju terciptanya kondisi masyarakat yang harmoni, terdidik, penuh toleran, dinamis, dan sejahtera serta diridloi oleh Tuhannya, maka para pemegang *policy* pendidikan berusaha untuk senantiasa melakukan terobosan-terobosan untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang dapat memenuhi

---

<sup>9</sup>Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, *Aims and Objectives of Islamic Education* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979), hlm.1.

<sup>10</sup>Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: Firdaus, 1989), hlm. 2.

<sup>11</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Rosda Karya, 1994), hlm. 50.

<sup>12</sup>Dalam hal ini, Hasan Langgulung mengatakan bahwa "remaja adalah harapan bangsa, runtuh dan tegaknya suatu negara terletak di tangan remaja-remaja. Remaja sehat, negara makmur, pemuda rusak negara hancur." Lihat Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam: Suatu Analisa Sosio-Psikologi* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1985), hlm. 124.

harapan-harapan di atas. Seluruh sistem kebijakan yang terkait dengan pendidikan senantiasa dikaji untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman, termasuk didalamnya adalah perbaikan manajemen.

### **Kebijakan Pendidikan Harus Berpihak pada Masyarakat**

Pendidikan yang dilaksanakan sebagai upaya pendewasaan mental, intelektual, dan spritual, maka dalam kebijakannya, pendidikan harus di-*setting* sedemikian rupa, sehingga keberadaannya dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Unsur utama dalam kesuksesan pendidikan adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusannya.<sup>13</sup>

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kondisi masyarakat yang sangat heterogen baik dalam aspek budaya, ras, agama dan sosial, menuntut adanya kebijakan pendidikan yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masing-masing unsur yang berbeda tersebut. Hal ini tentu saja tidak harus menghilangkan ciri khas pendidikan nasional yang mengedepankan unsur-unsur nasionalisme sebagai simbol pemersatu bangsa. Namun demikian pendidikan harus dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang sebenarnya akan menjadi tonggak kebesaran bangsa ini.

Sistem sentralisasi pendidikan yang sebelumnya mewarnai dunia pendidikan Indonesia dengan segala plus minusnya, telah terbukti kurang efektif mengantarkan bangsa ini untuk cepat keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan kebijakan pendidikan hanya dapat menguntungkan beberapa pihak dan merugikan pihak yang lain. Di antara kelemahan sistem pendidikan selama ini adalah adanya opini yang sama bahwa pendidikan dianggap berhasil bila ia mampu menjadikan peserta didik seperti orang lain (misalnya guru, atau tokoh-tokoh yang dianggap berhasil). Nilai kemandirian dan *independensi* peserta didik tidak mendapatkan perhatian.

Dalam hal ini Paulo Friere mengatakan bahwa pendidikan yang berkembang demikian hanyalah seperangkat sistem untuk meredam kebebasan dan kreasi sebagian besar umat manusia di dunia ini.

---

<sup>13</sup>BPPN dan Bank Dunia, *School Best Manajemen* (Jakarta: BPPN dan Bank Dunia, 1999), hlm. 21.

Melalui pendidikan yang semu, masyarakat awam senantiasa hanya akan mendengarkan iming-iming bahwa kebebasan, pencerahan dan kejayaan akan segera dimiliki setelah mereka menjadi kaum terpelajar. Akan tetapi kenyataan yang ada adalah kaum terpelajar akan semakin larut dengan khayalan yang sengaja diciptakan oleh kaum penguasa. Sedangkan janji yang mereka lontarkan tidak kunjung terwujud. Jala sutra pendidikan semacam ini oleh Friere disebut dengan pendidikan *dehumanisasi* yang akan membelenggu dinamisasi ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan yang dianggap mapan selama ini telah menyebabkan anak didik sebagai manusia asing dan tercerabut (*disenherited masses*) dari realitas dirinya sendiri dan realitas dunia sekitarnya, karena pendidikan telah mendidik anak didik untuk menjadi “seperti” orang lain, bukan dirinya sendiri.<sup>14</sup> Kondisi seperti ini harus segera dirubah, karena *dehumanisasi* meskipun merupakan sebuah fakta sejarah yang konkrit, bukanlah takdir yang turun dari langit, akan tetapi akibat dari tatanan sosial yang tidak adil yang melahirkan kekerasan dari tangan-tangan penguasa, yang pada gilirannya membuat masyarakat kelas bawah seperti bukan manusia.<sup>15</sup> Pendidikan harus menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia,<sup>16</sup> dan pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang memanusiakan.<sup>17</sup>

Menurut Freire tatanan masyarakat yang tidak adil, akan melahirkan iklim yang tidak kondusif, serta akan memandekkan demokratisasi

---

<sup>14</sup>Paulo Friere, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. xii.

<sup>15</sup>Paulo Friere, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Herder and Herder, 1968), hlm. 28. Baca juga William A. Smith, *Contcientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 80.

<sup>16</sup>Para pemerhati pendidikan mengatakan bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai: (1) sarana pengembangan SDM untuk pertumbuhan ekonomi, (2) sarana sosialisasi nilai dan rekonstruksi sosial, (3) sarana penyadaran dan pembangunan politik, dan (4) wahana pelestarian kekuasaan kaum penguasa. Baca James A. Coleman, *Education and the Political Development* (Princeton: New jersey, 1969). Lihat juga Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 63.

<sup>17</sup>Paulo Friere, “Pendidikan yang Membebaskan adalah Yang Memanusiakan” dalam *Menggugat Pendidikan: Fundamentalis, Konservatif Liberal, Anarkis*, terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 434-457.

### *Perkembangan Kebijakan Pendidikan*

pendidikan.<sup>18</sup> Dalam suasana semacam ini kebebasan berfikir akan menjadi sebuah keniscayaan, karena masyarakat akan terdiktomi pada masyarakat kaum *borju* yang diwakili oleh kaum penguasa dan masyarakat *proletar* yang digambarkan sebagai masyarakat awam. Kaum *borju* akan menjadi penguasa bagi masyarakat awam dalam semua aspek kehidupannya, termasuk dalam hal ini adalah pendidikan. Kurikulum, sistem, dan model pembelajaran sepenuhnya akan ditentukan oleh kaum penguasa. Pada gilirannya sistem semacam ini akan menyebabkan stagnasi ilmu pengetahuan.<sup>19</sup>

Dalam bahasa lain, Freire menyebut pendidikan *dehumanisasi* sebagai proses alienasi dan dominasi yang dapat melahirkan asumsi bahwa orang yang menguasai ilmu pengetahuan justru meniadakan prinsip kesadaran aktif, karena pendidikan ini akan menjalankan praktek-praktek untuk “menjinakkan” kesadaran manusia tentang diri dan dunia luar. Dalam konsep ini, murid diposisikan sebagai “wadah kosong”, sementara guru merupakan satu-satunya sumber pengetahuan. Implementasi dari konsep ini adalah pemindahan ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada “kesadaran benda kosong”. Dengan demikian, ilmu pengetahuan akan menjadi stagnan dan pendidikan hanyalah sebuah “rekayasa”.<sup>20</sup> Peserta didik diposisikan sebagai obyek, pola yang dikembangkan adalah instruksional dan anti dialog (*paternalistik*) dan pendidikan sebagai alat pembenaran dari praktik-praktik politik penguasa, yang dapat menyebabkan budaya manipulatif dan menutup kreatifitas.<sup>21</sup>

Pada konsep sebaliknya pendidikan yang *humanis* akan menumbuhkan pemberdayaan manusia dan masyarakat melalui ilmu pengetahuan, dan menempatkan “kesadaran” sebagai hasrat (*intention*)

---

<sup>18</sup>Dalam hal ini, Harold mengatakan bahwa pada dasarnya pendidikan akan berhasil apabila dilaksanakan dalam iklim demokratis yang sehat. Karena pendidikan dilaksanakan untuk melestarikan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, ia harus dilaksanakan secara demokratis. Baca Harold B. Albery dan Elsie J. Albery, *Reorganizing the High School Curriculum* (New York: The Macmillan Company, 1962), hlm. 34.

<sup>19</sup>William A. Smith, *Conscientizacao Tujuan Pendidikan*, hlm.1-3.

<sup>20</sup>Paulo Friere, *Politik Pendidikan*, hlm. 191.

<sup>21</sup>Paulus Mujiran, *Pernik-Pernik Pendidikan: Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan Penyadaran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 103.

terhadap dunia, yang pada gilirannya pendidikan humanis akan mendinamiskan perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>22</sup>

Dalam konteks ini, Freire menyebut pendidikan humanis dengan pendidikan *liberal*,<sup>23</sup> yang akan memberdayakan kebebasan manusia dalam menyadari diri dan dunia luar, karena sejatinya pendidikan adalah proses penyesuaian anak dengan lingkungannya, baik dalam bidang sosial maupun iklim politik yang ada.<sup>24</sup> Konsep ini akan menitik beratkan pada hubungan dialogis antara kesadaran manusia dan dunia atau antara manusia dengan dunianya sendiri. konsep ini pula yang melahirkan paham netralitas pendidikan.<sup>25</sup>

### Otonomi Daerah dan Kebebasan Pendidikan

Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan angin segar pada masing-masing daerah untuk mengelola seluruh kebijakannya dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Memang pemberian kewenangan tersebut tidak serta merta menghilangkan keterkaitan daerah dengan pemerintah pusat,<sup>26</sup> akan tetapi kondisi tersebut telah cukup membukakan pintu aspirasi masyarakat bawah untuk ikut andil dalam menentukan kebijakan yang akan berimplikasi langsung pada kehidupan mereka di masa mendatang.

Pasal 11 dari Undang-Undang tersebut mencakup semua bidang pemerintahan, yakni pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, dan koperasi serta tenaga kerja. Dengan undang-undang ini, maka jelaslah bahwa pendidikan menjadi

---

<sup>22</sup>Paulo Friere, *Politik Pendidikan*, hlm. 191.

<sup>23</sup>Dalam hal ini harus dibedakan antara pemahaman liberal dalam arti memberikan kebebasan bergerak dalam kebijakan pendidikan dengan liberal yang bermakna sekuler yang berimplikasi pada pengurangan kontrol dan pelepasan keterikatan antara pendidikan dengan nilai keagamaan.

<sup>24</sup>Robert Maynard Hutchins, "Pendidikan Liberal Sejati" dalam *Menggugat Pendidikan*, hlm. 109.

<sup>25</sup>Paulo Friere, *Politik Pendidikan*, hlm.190.

<sup>26</sup>Ada beberapa sektor kebijakan yang memang sepiantasnya tetap dipegang oleh pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Lihat pasal 7 Undang-undang No. 22 tahun 1999.

### *Perkembangan Kebijakan Pendidikan*

wewenang daerah untuk mengelolanya. Meskipun standarisasi pendidikan tetap mutlak dibutuhkan, dan itu menjadi tugas dan wewenang pusat, akan tetapi dalam menentukan arah dan kebijakan pengelolaan rumah tangga lainnya pemerintah daerah dituntut untuk lebih akomodatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan. Perubahan kebijakan pendidikan dari era sebelumnya dapat dikatakan adanya perubahan sistem pendidikan dari model sentralisasi ke sistem desentralisasi. Hal inilah yang dimaksudkan oleh pasal 8 Undang-Undang di atas menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan sepenuhnya diberikan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota.<sup>27</sup>

Dalam memanfaatkan peluang ini, pemerintah daerah harus tetap mengacu pada prinsip utama pendidikan. Prinsip utama tersebut adalah efisiensi, efektivitas, kontinuitas, fleksibilitas program, relevansi dan pendidikan seumur hidup.<sup>28</sup> Dalam hal ini, Mulyasa mengatakan bahwa penerapan otonomi daerah bidang pendidikan harus mengacu pada hal-hal berikut:<sup>29</sup>

1. Prinsip berorientasi pada tujuan.
2. Prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana, daya, dan waktu dalam mencapai tujuan pendidikan.
3. Prinsip fleksibilitas program. Dalam pelaksanaan suatu program harus diperhatikan faktor ekosistem dan penyediaan fasilitas yang menunjang.
4. Prinsip kontinuitas dengan mempersiapkan peserta didik supaya mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Prinsip pendidikan seumur hidup yang memberikan pemahaman bahwa pendidikan tidak hanya ditempuh di bangku sekolah, akan tetapi masyarakat dan lingkungan adalah tempat belajar yang lebih luas.

---

<sup>27</sup>Lihat selengkapnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>28</sup>Philip Suprastono Iskandar, *Peran Serta masyarakat di Sekolah Dasar* (Bandung: Mimbar Pendidikan, 1990), hlm. 137-139.

<sup>29</sup>E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 8-9.

6. Prinsip relevansi. Suatu pendidikan akan bermakna apabila kurikulum yang digunakan relevan (sesuai) dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

### **MBS; Implementasi Desentralisasi Pendidikan**

Sebelum berbicara tentang makna dan tata laksana kerja Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), lebih dahulu harus dipahami makna manajemen secara umum. Secara etimologis, manajemen berarti ketatalaksanaan dan tata pimpinan.<sup>30</sup> Manajemen juga berarti kepemimpinan terhadap suatu kelompok guna mencapai tujuan.<sup>31</sup> Sedangkan secara terminologis, manajemen berarti ilmu atau seni mengatur pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>32</sup>

Pada makna yang lebih umum, Hasibuan dengan mengutip pendapat Terry, mengatakan bahwa: "*Management is a distance process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determined and accountilish stated objectives by the use of human being and other resources.*" (Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya).<sup>33</sup>

Lebih luas, Burhanuddin dengan mengutip pendapat Harold Kontz mendefinisikan manajemen sebagai usaha pencapaian tujuan yang diinginkan dengan membangun suatu lingkungan (suasana) yang kondusif terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam sebuah kelompok yang terorganisir. Dengan demikian tindakan manajemen nampak terlihat dalam segenap usaha administrator (manajer) untuk mengatur individu-individu yang terlibat dalam suatu organisasi, sehingga memungkinkan mereka dapat menyumbangkan

---

<sup>30</sup>John E. Chols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Grafindo, 1986), hlm. 372.

<sup>31</sup>Jhon Adair, *Membina Calon Pimpinan*, terj. Soedjono Trimo (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 4.

<sup>32</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen SDM* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.1-2.

<sup>33</sup>Ibid, hlm. 3.

### *Perkembangan Kebijakan Pendidikan*

tenaga dan pikiran seoptimal mungkin demi tercapainya tujuan bersama.<sup>34</sup>

Dari beberapa definisi yang diutarakan para tokoh tersebut dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa unsur utama manajemen adalah pendayagunaan, kerjasama, pengorganisasian, adanya tujuan dan target yang direncanakan. Dalam organisasi pendidikan, kepala sekolah sebagai manajer bertugas untuk mengorganisir seluruh staf yang dimilikinya untuk diberdayakan sesuai kemampuan dan tugas yang diberikan menuju sasaran yang ditetapkan bersama. Biasanya tujuan dan sasaran organisasi adalah penjabaran dari visi dan misi organisasi tersebut.

Proses dan kegiatan manajemen bertolak pada keterampilan seorang manager untuk mendayagunakan dan memanfaatkan sumber daya manusia dan penggunaan tenaga orang lain untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pengertian inilah yang dimaksudkan oleh Terry sebagaimana dikutip Panglaykim bahwa "*management is the accomplishing of a predetermined objective through the efforts of other people*".<sup>35</sup> (Manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terdahulu dengan mempergunakan tenaga orang lain). Jadi unsur utama dari manajemen adalah adanya sasaran, pemanfaatan sumber daya, dan pengawasan pimpinan.

Berangkat dari teori ini, sasaran sebuah organisasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota organisasi tersebut. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilakukan secara bersama-sama di bawah koordinasi manajer atau pemimpin organisasi. Adanya kerjasama sangat dipentingkan untuk menanamkan kesamaan visi menuju tercapainya tujuan yang telah dicanangkan. Kerjasama yang baik akan memberikan motivasi yang besar bagi seluruh anggota organisasi untuk memberikan potensi sumber dayanya secara optimal. Rasa memiliki terhadap keberlangsungan organisasi akan timbul dengan adanya pengorganisasian yang baik oleh pimpinan sebuah organisasi.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, manajemen berarti proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satuan organisasi pendidikan

---

<sup>34</sup>Burhanuddin, *Analisis Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.15.

<sup>35</sup>Panglaykim dan Hazil, *Manajemen, Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hlm. 27.

dengan mendayagunakan segala sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain menuju pencapaian tujuan pendidikan tertentu.<sup>36</sup>

Manajemen Berbasis Sekolah yang akhir-akhir ini muncul di negara kita, sebenarnya diilhami oleh sistem manajemen sekolah yang diterapkan di negara-negara maju seperti Australia dan Amerika. Gagasan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan keleluasaan pengelolaan pendidikan pada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan secara luas.<sup>37</sup>

Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Dengan manajemen model ini pimpinan lembaga pendidikan (Kepala Sekolah) memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penyederhanaan birokrasi, sistem evaluasi, pemetaan kurikulum dan sebagainya. Implementasi MBS akan banyak membantu lembaga pendidikan dalam melakukan analisis pengembangan, inovasi, dan improvisasi terhadap sumber daya yang dimiliki.

Di beberapa negara maju, MBS telah terbukti memberikan warna pendidikan yang lebih relevan terhadap kebutuhan masyarakat. Di samping itu, efektivitas dan efisiensi akan mudah dicapai dengan pola manajemen tersebut. Pada sisi lain keuntungan yang dapat dirasakan pengelola sekolah dengan sistem MBS di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru.
2. Pemanfaatan sumber daya lokal lebih besar, efektif dan profesional.
3. Efektivitas pembinaan peserta didik akan lebih mudah dicapai.
4. Adanya rasa tanggung jawab bersama antara pengelola sekolah, masyarakat dan pengguna jasa lainnya dalam menjaga kesinambungan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

---

<sup>36</sup>Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 32.

<sup>37</sup>Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, hlm. 11.

<sup>38</sup>Ibid, hlm. 24. Baca juga Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 52.

**Penutup**

Pendidikan merupakan aset bersama bangsa untuk mengantarkan masyarakat pada tingkat kemajuan intelektual, emosional dan spritual. Oleh karena itu pendidikan harus dijaga bersama oleh seluruh komponen bangsa ini. Maju mundurnya pendidikan tergantung pada keseriusan seluruh unsur yang terlibat di dalamnya (*stakeholders*). Terobosan demi terobosan terus dilakukan untuk menemukan formula terbaik dalam menjalankan pendidikan tersebut. Namun demikian hingga saat ini kesuksesan pendidikan di negara kita masih terus dipertaruhkan. Tulisan singkat ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran pada para pengelola pendidikan untuk senantiasa berusaha lebih memajukan lagi pendidikan kita. *Wa Allâh a'lam bi al-shawâb.\**